

PENGUATAN EKONOMI DALAM NEGERI DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL: RELEVANSI KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATHAB

Asep Saefurrohman

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam IAIN Walisongo Semarang

Abstract

Umar bin Khathab is the second khalifah that success for bringing Islam to the victory with a variety of foreign steps that implemented in lead Islam. Not except in economics problem and relation diplomatic that he form with some state and kingdom at that time. At Khalifah Umar bin Khathab era, they do reconstruction on baitul mal as country treasure, and arrange society economical problems from all aspect that relation with economic development as education, investment, infrastructure, and development of human resources. The writer explain condition of economic and foreign of khalifah Umar bin Khathab in consolidate country economic to face market rivalry that more open end and wide together with wider of region that enter under Islamic administration.

Keywords: *Economic, Foreign, and Umar bin Khathab.*

A. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi di ASEAN, demi mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat di kawasan ASEAN, seluruh negara anggota ASEAN telah sepakat mewujudkan langkah nyata dalam integrasi ekonomi dengan terbentuknya ASEAN *Economic Community* (AEC) yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015 lewat pertemuan para petinggi negara ASEAN dalam KTT ASEAN ke-13 tahun 2007 di Singapura. Ketika terbentuknya AEC, maka pada tahun 2015 kawasan ASEAN akan menjadi pasar tunggal di mana arus barang, jasa, tenaga trampil dan investasi akan semakin bebas, ini tentunya merupakan peluang dan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam memperkuat perekonomian dalam negeri, sehingga ketika AEC mulai diberlakukan tahun 2015 perekonomian Indonesia mendapat masalah (dampak positif) bukan mafsadah (dampak negatif). Dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN, dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dengan menempati posisi ke-16 di dunia. Di tingkat Asia, Indonesia hanya kalah dari Cina,

Jepang, India dan Korea Selatan. Di balik itu ternyata masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Indonesia salah satu contohnya berdasarkan survei *Asian Productivity Organization* tahun 2004, dari setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia hanya 4,3 persen yang tergolong terampil, sementara Filipina 8,3 persen, Malaysia 32,6 persen, dan Singapura 34,7 persen.¹

Indonesia sebagai negara kepulauan juga masih terkendala dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak merata dengan masih menempatkan Jawa-Bali sebagai yang terbaik, sementara Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tetap yang terburuk. Dilihat dari indikasi Indeks Pembangunan Manusia (IMP) Indonesia masih tergolong rendah. Sepanjang sejarah perhitungan IMP tahun 1980 sampai saat ini, nilai Indonesia masih dibawah rata-rata dunia. Bahkan di tingkat ASEAN Indonesia hanya unggul dari Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar.²

B. Umar bin Khathab Sang Amirul Mukminin

Nama Asli beliau adalah Umar bin Khathab bin Nufail bin Abdil 'Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luayyi bin Ghalib Al-Quraisyi Al-Adawi. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin Mughirah dari Bani Makhzumi. Hantamah merupakan saudara sepupu Abu Jahal.³ Umar bin Khathab meriwayatkan 539 hadits dan mengucapkan dua kalimat syahadat pada usia 23 tahun dan wafat pada usia 63 tahun.⁴ Nama kunyah beliau Abu Hafsini dan laqobnya Al Faruq, beliau digelari Al Faruq dikarenakan Umar bin Khathab secara terang-terangan memperlihatkan keislamannya, sehingga beliau mampu membedakan antara yang hak dan yang bathil.⁵ Kabar mengenai keislaman Umar disambut gembira oleh Rasulullah, sampai-sampai beliau mendoakan kemuliaan Islam dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam.

Beliau termasuk sahabat yang al faqih dan juga adil dalam menentukan kebijakan dalam mengatur pemerintahan, selain kedua sifat itu, beliau terkenal tegas terhadap perkara-perkara yang di syariatkan Islam dan keras terhadap sesuatu yang dilarang agama, sebagaimana disebutkan dalam hadits nabi:

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر واشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرؤهم لكتاب الله
أبي بن كعب وأفضهم زيد بن ثابت وأعملهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة
أميناً وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.

“Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling keras dalam perkara (agama) Allah adalah Umar, yang paling benar dalam malu adalah Utsman, yang paling bagus bacaan qur’annya adalah Ubay bin Ka’ab, yang paling menguasai ilmu Faraidh adalah Zaid bin Tsabit, dan yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu’adz bin jabal. Dan ketahuilah, bahwa dalam setiap umat terdapat orang yang memegang amanat, dan yang yang dapat dipercaya dalam memegang amanat dalam umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al Jarrah.⁶

Masa ke khalifahan Umar bin Khathab selama kurang lebih 10 tahun dan 6 bulan berhasil mencatatkan prestasi-prestasi gemilang yang dicatat tinta emas dalam sejarah peradaban umat manusia dan khususnya bagi umat islam. Khalifah Umar berhasil menunjukkan kekuatan islam diantara dua imperium besar, yaitu Romawi di barat dan Persia di timur dengan menguasai tempat-tempat penting dan strategis yang menjadi pusat peradaban manusia seperti Mesir, Irak, Jerusalem, dan Suriah. Pemerintahannya menurut Montgomery Watt (1990), seorang orientalis ternama mengatakan pemerintahan Umar bin Khathab merupakan tahan ekspansi negara islam yang mengagumkan.⁷

Pemerintahan yang dibangun Umar bin Khathab begitu transparan dan terbuka. Umar bin Khathab sangat terbuka dalam menerima ilmu pengetahuan seperti mengadopsi sistem akuntansi dan management dari Persia dalam mengatur kebijakan fiskal negara di Baitul Mal. Pengaplikasian sistem yang Umar adopsi menjadi sistem yang sangat maju dan mutakhir pada masa itu, sehingga pemerintahan Umar bin Khathab terkenal akuntabel dan transparan. Ketika kekuasaan islam semakin meluas sampai ke negeri Mesir dan Syiria, beliau mengadopsi ilmu arsitektur penataan kota, dan sistem irigasi untuk ladang pertanian dari kedua wilayah tersebut untuk diterapkan dalam membangun kota Kuffah dan Kisra.⁸

Untuk menjaga stabilitas perekonomian untuk sekarang dan masa yang akan datang, Umar bin Khathab membentuk sistem pengolahan tanah milik pemerintah sebagai simpanan, jadi manfaat tanah tersebut

bisa dirasakan oleh generasi berikutnya. Lain halnya dengan apa yang terjadi saat ini banyak negara yang melakukan utang untuk generasi hari ini yang harus ditanggung generasi mendatang untuk membayar utang tersebut.⁹ Umar bin Khathab sangat menekankan etos kerja dan kreatifitas dalam meningkatkan produksi dan perekonomian masyarakat dari pengalokasian dana jaminan sosial untuk bisa dijadikan sebagai mata pencaharian, ini terlihat dari kebijakannya dalam mengalokasikan zakat dari hewan ternak yang diprioritaskan bagi orang yang memiliki satu kambing, sehingga kedepannya orang tersebut mampu mengembangkan hewan ternaknya dan mengangkat taraf hidupnya kedepan. kebijakan ekonomi produktif yang diterapkan Umar bin Khathab mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan menaikkan taraf hidup masyarakat pada masanya.

C. Analisis Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathab

Kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khathab dalam penguatan perekonomian dalam negeri kawasan islam yang semakin luas, ada beberapa langkah kebijakan ekonomi Umar bin Khathab yang penting untuk dibahas dan masih relevan untuk dijadikan sebagai perbandingan dalam mengatasi problem perekonomian yang di hadapi Indonesia sekarang ini. Dalam menjalin hubungan ekonomi internasional, Umar bin Khathab terlebih dahulu fokus dalam penguatan perekonomian dalam negeri dari menyediakan lapangan pekerjaan, investasi, pengembangan SDM & SDA, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Ini ditempuh khalifah Umar bin Khathab sebagai langkah antisipasi dalam dampak negatif yang akan timbul dari hubungan ekonomi antar negara. Kebijakan penguatan ekonomi dalam negeri yang dibangun Umar bin Khathab sebelum menjalin hubungan ekonomi internasional sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM

Untuk menopang kebutuhan ekonomi suatu negara tentunya dibutuhkan SDM yang memadai untuk mengakomodir segala sektor perekonomian. Dan sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kemuliaan pada manusia melebihi makhluk ciptaan-Nya yang lain sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 70 yang artinya:

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia tidak lain harus dijadikan sebagai sarana dalam penghambaan diri kepada Allah. Umar bin Khathab memandang pertumbuhan penduduk bukanlah sebuah problem dalam permasalahan ekonomi suatu negara. Untuk memaksimalkan SDM yang dimiliki negaranya, Umar bin Khathab mengambil langkah representatif dalam pengembangan SDM rakyatnya, di antara yang jadi fokus utama Umar bin Khathab dalam pengembangan SDM sebagai berikut:

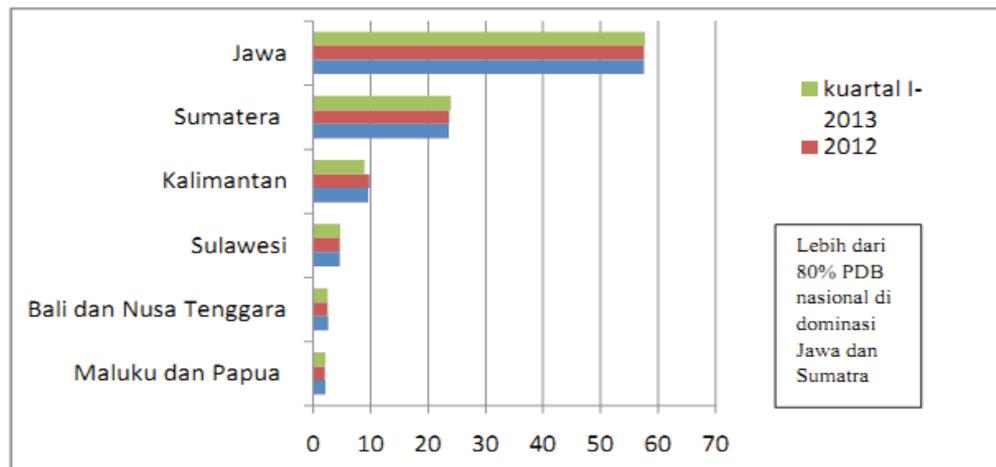
a. Pengembangan dan Pemerataan Kuantitas SDM

Pengembangan dan pemerataan kuantitas pada masa Umar di lakukan dengan cara menghimbau rakyatnya untuk memperbanyak keturunan, langkah ini diambil karena pada masa awal umat muslim masih sedikit, sehingga untuk memperkuat dan menjaga keutuhan umat islam, Umar bin Khathab menghimbau rakyatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan.¹⁰ Langkah yang kedua untuk melakukan pemerataan SDM, Umar menghimbau rakyatnya untuk melakukan hijrah internal antara satu daerah ke daerah lain yang masih dalam satu negara. Selain mengeluarkan anjuran untuk melakukan hijrah internal, Umar juga menganjurkan melakukan hijrah eksternal, yaitu perpindahan penduduk ke negara lain.

Disparitas jumlah penduduk yang menjalankan kegiatan ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan problem lama yang di hadapi pemerintahan Indonesia, ini terlihat dari perputaran ekonomi yang tidak merata antara daerah satu dengan daerah lain. Lebih dari 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional masih disumbang pulau Jawa dan Sumatera. Ironisnya lagi, meski hanya menyumbang 7 persen dari wilayah Indonesia, pulau Jawa menyumbang 57 persen dari PDB Nasional. Empat provinsi penyumbang PDB Nasional terbesar pada kuartal I-2013 juga terdapat di Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan sumbangan kumulatif ke PDB nasional lebih dari 50 persen.¹¹ Dampak yang muncul akhirnya muncrat ke atas (*trickle up effect*) dengan semakin makmurnya orang kalangan atas, bukan menetes ke bawah (*trickle down effect*) di mana masyarakat kalangan menengah atas di semua

penjuru tanah air bisa ikut merasakan manis dari tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Kondisi seperti ini menurut BPS tidak akan berubah sampai 30 tahun kedepan tanpa adanya terobosan kebijakan dari pemerintah.

Tabel 1: Peranan wilayah/ pulau dalam pembentukan pdb Nasional (persen).



Ketika membandingkan keadaan ekonomi pada masa khalifah Umar bin Khathab dalam menjawab disparitas perekonomian antar wilayah, Umar bin Khathab memiliki metode politik dalam menyelesaikan dampak-dampak hijrah (migrasi), yang rambu-rambu politiknya dapat kita kenali dalam beberapa poin berikut ini:¹²

Pertama, hijrah eksternal pada masa khalifah Umar tidak mengalami kesulitan seperti yang terjadi sekarang, bahkan sebaliknya beberapa kaum masuk ke dalam Islam, dan beberapa kaum masuk ke dalam perjanjian dengan kaum muslimin.

Kedua, dalam kaitannya dengan hijrah internal, Umar bin Khathab mengeluarkan kebijakan Politik dalam mengatur hijrah internal.

Sebelum negara-negara kontemporer berupaya membatasi hijrah internal (urbanisasi) yang akan berdampak negatif dengan cara meningkatkan tingkat ekonomi bagi penduduk desa, Umar bin Khathab sudah jauh lebih dahulu diterapkan oleh beliau dengan mendata jumlah penduduk di kota dan desa. Ini bertujuan untuk pengalokasian anggaran dari *Baitul Mal* secara

tepat sasaran tanpa memindahkan penduduk dari tempat, melainkan mengembangkan perekonomian di tempatnya masing-masing. Dalam permasalahan pemerataan anggaran Indonesia masih mengalami problem klasik, dengan menempatkan Jawa-Bali sebagai sasaran utama dalam pengalokasian anggaran dari fungsi-fungsi yang terkait dengan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Tahun 2012 wilayah ini mengambil sekitar 31 persen untuk fungsi ekonomi. Bahkan untuk pendidikan dan kesehatan mencapai 44 dan 46 persen.¹³ Perhatian Umar terhadap penduduknya di kota atau di desa tidak dibedakan, ini terlihat dari perkataannya bahwa jika beliau masih hidup, niscaya akan sampai kepada penggembala di gunung Shan'a bagiannya dari Baitul Mal, dan dia tetap berada di tempatnya tanpa harus mengadu nasib ke perkotaan.¹⁴

Kemudian apabila hijrah internal di sukai penduduknya, maka Umar bin Khathab mengarahkan penduduknya untuk hijrah ke daerah yang baik dengan di tunjang fasilitas dan infrastruktur yang memadai, untuk kedepannya mereka bisa mengembangkan perekonomian di daerah tersebut. Ini yang terjadi pada seribu keluarga yang keluar dari Hamadan menuju Madinah untuk menemui Umar. Ketika kereka ditanya akan melakuka hijrah kemana, mereka menjawab akan melakukan hijrah ke Syam, kemudian Umar mengrahkan mereka untuk hijrah ke Irak karena disana sudah ada ladang pertanian dan irigasi yang bagus. Boleh jadi hijrah internal merupakan tuntutan bagi kemaslahatan ekonomi baik individu maupun kelompok. Sebagai contohnya bahwa ketika sebagian daerah mengalami kepadatan penduduk atau kekurangan sumberdaya, maka solusinya adalah melakukan hijrah. Himbauan hijrah untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dan kemaslahatan disebutkan dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 100 yang artinya:

“Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah

tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

b. *Tazkiyah* dan *Ta'lim*

Alquran mengaitkan *Tazkiyah* dan *Ta'lim*, karena keduanya bagai dua sisi koin yang salah satu sisi dari keduanya tidak akan sempurna tanpa kehadiran sisi yang lainnya. *Tazkiyah* diartikan dengan menjelaskan akhlak yang baik dan menghimbau kepadanya dan mencegah dari akhlak yang buruk.¹⁵ Sedangkan *Ta'lim* sendiri merupakan *mashdar* dari *Ta'allama* yang berarti belajar, jadi *Ta'lim* bisa diartikan sebagai Pendidikan. Imam Al Ghozali dalam kitab *Ihya ulumuddin* memandang pendidikan dan *Tazkiyah* sebagai dua aspek penting dalam membangun dan menjaga stabilitas ekonomi. Imam Al-Ghozali melarang orang-orang yang tidak mengetahui ilmu mu'amalah yang baik melakukan peran aktif dalam perekonomian. selain menekankan pada pendidikan, Imam Ghozali sangat memperhatikan etika dalam bermu'amalah, etika dalam perekonomian diumpamakan sebagai *Ar-Ribhu* (keuntungan)¹⁶ Umar bin Khathab sangat memikirkan keduanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini terlihat dari perintahnya kepada para gubernur di tiap daerah yang ditugaskan untuk menempatkan pendidikan sebagai tugas dasar yang harus di perhatikan.

c. Perlindungan Terhadap Konsumen

Ketika menyinggung tentang pemasalahan hubungan ekonomi internasional, aspek yang juga menjadi perhatian khalifah Umar bin Khathab adalah perlindungan terhadap konsumen, dikarenakan pada masa beliau arus barang yang dibawa oleh para pedagang keluar masuk negara mengalami peningkatan. Dalam permasalahan makanan, Umar bin Khathab terbuka dalam menyikap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, seperti ketika beliau berkunjung ke Syam, rakyat mengadukan wabah berat, kemudian beliau memerintahkan kepada rakyat Syam untuk meminum madu, namun rakyat Syam tidak cocok untuk meminum madu akhirnya Umar memerintahkan untuk meminum thila' setelah mendapatkan masukan dari masyarakat.

Sesungguhnya Al-Quran memberi isyarat tentang kualitas dan kuantitas makanan yang sehat. Di mana tentang kuantitas Allah berfirman tentang larangan mengenai perilaku berlebihan dalam surat Al-A'raf: 31. Sedangkan dalam permasalahan tentang kehalalan dan makanan yang baik, Allah berfirman "Dan (Dia) menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Al-A'raf: 157).

Pentingnya menjamin makanan yang halal lagi baik perlu menjadi perhatian pemerintah dalam melindungi konsumen. Ini dibuktikan dari semua obat yang beredar di Indonesia memiliki kemungkinan tidak halal. Salah satu penyebabnya adalah 90 persen bahan baku obat di Indonesia berasal dari impor yang belum memperhatikan kehalalan dalam proses produksinya. Kondisi ini mempersulit sertifikasi obat halal di Indonesia. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) telah berkampanye sejak 2005 untuk mendorong perusahaan untuk mendaftarkan produk agar mendapat sertifikasi halal. Namun sampai saat 2013 LPPOM-MUI baru mencatat 22 obat yang halal dari 30 ribu item obat.¹⁷ Jadi ini jelas harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah mengenai regulasi dan sertifikasi produk halal menjelang pasar bebas 2015.

2. Pengembangan Sumber Daya Alam

Dalam mengembangkan sumberdaya alam, Khalifah Umar bin Khathab menerapkan kebijakan-kebijakan di antaranya adalah menghidupkan lahan mati, pengaplingan, lahan yang dilindungi, pengaturan eksplorasi bumi di daerah taklukan dan air. Ketika dilarikan ke zaman sekarang mungkin ada tiga poin penting dari kebijakan Umar bin Khathab yang penting untuk dipertimbangkan. Mengenai kebijakan menghidupkan lahan mati, Umar bin Khathab memberi fasilitas lahan bagi siapa saja yang hendak menggarap lahan tersebut dengan dijanjikan lahan tersebut akan menjadi miliknya. Kemudian khalifah Umar juga membangun irigasi untuk menunjang penggarapan lahan oleh rakyatnya. Kebijakan ini ditempuh Umar bin Khathab untuk menjaga ketahanan pangan negaranya. Ini kiranya bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yang

harus memikirkan kembali mengenai urgensi penggarapan lahan pertanian yang makin lama semakin berkurang sehingga berimbas pada ketahanan pangan dalam negeri yang semakin tak terkendali. Ini diperparah dengan semakin sulitnya para petani memperoleh pupuk, sebagai contoh keputusan Gubernur Jawa Tengah No 74 tahun 2013 tentang kuota pupuk urea di Kabupaten Semarang mengalami penurunan hingga 1.211 ton. Pada 2014 jatah pupuk urea sebesar 12.139 ton, SP-36 2.203 ton, ZA 1.855 ton, NPK 5.133 ton, dan pupuk organik 2.015 ton. Padahal tahun sebelumnya kuota pupuk urea sebesar 13.350 ton, SP-36 2.305 ton, ZA 2.975 ton, NPK 3.910 ton, dan pupuk organik 2.500 ton.¹⁸ Kebijakan seperti ini tentunya dapat menghambat para petani dan menimbulkan rasa “enggannya” menanam karena semakin banyak menghadapi hambatan, imbasnya tentu ketahanan pangan akan goyah.

Mengenai Lahan yang dilindungi (*ardul hima*), setiap negara memiliki tanah larangan, jadi pemerintah memiliki otoritas penuh melarang pengolahan lahan dengan tujuan agar lahan tersebut dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umum.¹⁹ Hutan-hutan lindung yang dimiliki Indonesia harus dijaga dan dipertahankan peran dan fungsinya untuk menjaga keseimbangan alam, sehingga menjadi sebuah *ikhtiyar* dan *washilah* agar terhindar dari bencana alam.

Dalam pengaturan pengeksplorasian tanah di bumi taklukan, Umar sangat antusias dalam permasalahan ini. Umar mengeluarkan kebijakan dalam mengeksplorasi lahan harus dengan catatan penduduk setempat masih menempati tanah yang ditempatinya.²⁰ Kebijakan berikutnya adalah menetapkan tanah *As Shawafi*, yaitu tanah yang dipilih Umar dari *As-Sawad* (lembah rimbun di Irak) di mana Umar tidak menghapusnya dan tetap menetapkan *Kharaj* seperti halnya *As-Sawad* yang lain. *As-Shawafi* adalah tanah produktif yang tidak ada pemilikinya karena milik keluarga pemerintah atau milik umum peninggalan kerajaan Persia. Ini Hendaknya jadi poin pemerintah dalam mengambil kebijakan eksplorasi lahan tanpa mengganggu dan mengusik penduduk setempat.

3. Pembentukan Modal

Pembentukan modal dengan apapun bentuknya merupakan pilar penting dalam menopang kesuksesan pengembangan ekonomi. Umar bin Khathab membagi dua kategori dalam pembentukan modal,

yaitu modal hakiki dan modal sosial.

Yang dimaksud dengan modal hakiki adalah pembentukan modal untuk barang-barang dasar yang dapat dipergunakan di dalam produksi. Kebijakan mengenai pembentukan modal investasi sangat diperhatikan Umar, dan melarang rakyatnya untuk hutang yang ada unsur riba dan hutang yang tanpa pertimbangan yang matang sehingga justru dapat memberatkan kedepannya, seperti apa yang dikatakan Umar kepada Usaifi' Juhainah yang rela hutang demi menyandang predikat haji tercepat, Usaifi' meremehkan hutang sampai meliputi hartanya. Bahkan Umar sampai menjamin bagi orang yang memiliki piutang kepada Usaifi' untuk datang kepadanya, kemudian Umar membayarkan hutangnya.²¹ Dalam menghadapi AEC Di mana arus investasi semakin bebas, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan Investasi yang masuk kedalam negeri agar stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik.

Dalam permasalahan pembentukan modal sosial, kebijakan Umar dalam menggunakan dana sosial lebih kepada penunjang kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan masjid, pelayanan pos dan pelayanan umum lain. Dalam mengalokasikan dana sosial juga Umar fokus kepada pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi seperti akses jalan. Yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia mengenai infrastruktur penunjang seperti jalan raya adalah infrastruktur jalan di Indonesia tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang di dominasi sepeda motor dan mobil pribadi. Sebagai contoh di daerah Surabaya kenaikan jumlah kendaraan mencapai 7,12 persen sedangkan panjang jalan kota Surabaya pada tahun 2009 hanya 1.160 kilometer. Selama empat tahun penambahan jalan hanya 0.01 persen.²² Pembangunan infrastruktur yang merata dan memadai harus di perhatikan secara lebih serius dalam usaha memajukan dan mengembangkan ekonomi dalam negeri.

D. Kesimpulan

Dari paparan analisis yang telah dijelaskan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan Umar bin Khatab dalam membangun perekonomian tidak lepas dari perhatian beliau kepada kesejahteraan

masyarakat. Prioritas Umar bin Khathab sebagai khalifah dalam menjaga perekonomian lebih kepada membangun infrastruktur dan kebijakan-kebijakan yang mendorong semangat masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian.

Jauh sebelum ekonom kontemporer membahas tentang dampak negatif dari urbanisasi, Umar bin Khathab sudah mengantisipasi hal tersebut dengan mendorong perekonomian di desa-desa untuk pemerataan ekonomi yang didukung oleh arah kebijakan dan pembangunan infrastruktur. Sehingga pada masa Umar bin Khathab wilayah Islam mengalami kemajuan yang signifikan dalam hal perekonomian, ini terbukti dengan bertambahnya pemasukan negara baik dari kharaj, zakat atau yang lainnya.

Ketika melihat langkah kebijakan Umar bin Khathab menurut analisis penulis, masih tepat untuk dijadikan sebagai referensi dalam menyelesaikan problem perekonomian pada zaman sekarang. pemerintah harus menaruh perhatian lebih dalam memikirkan aspek-aspek pendukung dalam pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Anggaran kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain yang masih terjadi ketimpangan antara daerah yang satu dan daerah yang lain yang masih menempatkan Jawa-Bali sebagai prioritas utama, perlu dijadikan perhatian yang serius, jadi ketika AEC pada tahun 2015 terbentuk Indonesia sudah siap dan punya pertahanan dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi pasar bebas.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap barang, jasa, dan Investasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dalam menghadapi persaingan global. Khusus pada makanan, Indonesia harus segera memperketat aturan dan sertifikasi produk halal. Ini dirasa perlu sebab kesadaran dari pihak produsen akan pentingnya kehalalan produk yang diperjual-belikan karena konsumen di Indonesia mayoritas muslim.

E. Saran

Dari paparan analisis di atas, penulis dapat merumuskan saran sebagai berikut:

1. Kepada semua pihak yang terkait terutama pemerintah selaku pengatur kebijakan, hendaknya memperhatikan kepentingan rakyat jagan semata-mata mementingkan pelaku ekonomi dalam hal ini para

pengusaha besar, dengan mengesampingkan kesejahteraan rakyatnya. Perlu juga menjadi perhatian pemerintah mengenai kebijakan dalam pembangunan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang belum merata dan terkesean lebih mementingkan daerah perkotaan. Pengawasan terhadap produk halal masih sangat minim, jadi kepada pihak yang terkait untuk segera mengambil langkah representatif sebelum pasar bebas ASEAN terbentuk.

2. Bagi akademisi perlu analisis dan penelitian yang komprehensif dalam mengkaji sejarah dan peradaban Islam, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan dalam mengambil kebijakan yang tidak hanya dari sisi duniawi saja melainkan ada tujuan *ukhrawi* di dalamnya.

Endnotes

- ¹ Kompas. 25 Oktober 2013. hal 40.
- ² Ibid. hal 45.
- ³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, op.cit., hal 17.
- ⁴ *Ibanatul Ahkam syarh Al Bulughul Maram*, Bairut : Dar Al Fikr, 2008, jilid 1 hal 81. Terdapat perbedaan pendapat mengenai usia Umar bin Khathab, menurut Ibnu Jauzi dan Ibnu Katsir menyebutkan usai Umar bin Khathab 65 tahun.
- ⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, op.cit. hal 18.
- ⁶ Ahmad, Almusnad, hadits no. 12493.
- ⁷ Watt, W Montgomery, 1990. *The Majesty of islam*, edisi terj., Yogya : Tiara Wacana, hal. 8.
- ⁸ Karim, Adiwarmen A., sejarah pemikiran ekonomi islam, 2006, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cetakan ke-4, hal. 76-77.
- ⁹ Jabirah bin Ahmad Al-Haritsi, op.cit. hal 292.
- ¹⁰ Ibid, hal 442.
- ¹¹ Kompas, 25 oktober 2013. Hal 48.
- ¹² Jabirah bin Ahmad Al-Haritsi, op.cit, hal 444.
- ¹³ Kompas, op.cit., hal 45.
- ¹⁴ Jabirah bin Ahmad Al-Haritsi, op.cit., hal 445.
- ¹⁵ Ibid, hal 449. Di ambil dari Ibnu Said, tafsir Al Karim Al rahman fi Tafsir Kalam Al Minnan, hal. 779.
- ¹⁶ Al Ghozali, Ihya Ulumuddin, jilid 2 hal.80.
- ¹⁷ Republika, 16 Desember 2013, hal 1.
- ¹⁸ Republika, 10 Januari 2013, hal 17.
- ¹⁹ Jabirah bin Ahmad Al Haritsi, op.cit, hal 480.

²⁰ Ibid, hal 487.

²¹ Ibid, hal 510.

²² Kompas, 2 Desember 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Almusnad, hadits no. 12493.

Al Arif, M. Nur Riyanto, 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam Solo: Era Adicitra Intermedia*.

Al Ghozali, Ihya Ulumuddin, jilid 2.

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* Jakarta: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup).

Karim, Adiwarman A., 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kitab Ibanatul Ahkam syarh Al Bulughul Maram, 2008. Beirut: Dar Al Fikr.

Keraf, Gorys, 2001. *Komposisi* Jakarta: Nusa Indah.

Watt, W Montgomery, 1990. *The Majesty of islam*, Yogya: Tiara Wacana.

Kompas, 25 Oktober 2013.

_____ 2 Desember 2013.

Republika, 16 Desember 2013.

_____ 10 Januari 2013.